

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia (*human development*) telah diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam *Global Human Development Report*. Konsep ini disebut sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the people's choices*), Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Pemerintah dalam hal ini merupakan fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih luas. Gambaran yang dapat diambil guna melihat seberapa jauh peran pemerintah untuk menjadi fasilitator dari Pembangunan Manusia adalah melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah yang diambil. Salah satu hal yang paling menentukan dalam suksesnya Pembangunan Manusia adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga dua sektor tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah guna mewujudkan Pembangunan Manusia yang pada akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor.

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report*, 1995: 03), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus fokus pada seluruh penduduk dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan upaya peningkatan kemampuan manusia, tetapi juga upaya untuk menggunakan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didasarkan pada empat pilar utama: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia merupakan dasar untuk menentukan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan konsep ini, kependudukan ditetapkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan. ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu

1. Produktivitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kajian produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Definisi Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi

(Christina 2011). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

1. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
2. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
3. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
4. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Menurut UNDP, salah satu cara mengukur kualitas modal manusia di suatu negara dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau sering disebut dengan *Human Development Index* (HDI). *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mencerminkan kondisi suatu negara dibandingkan dengan kondisi negara lain dalam hal tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tiga sektor dasar pembangunan manusia, meliputi:

Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), dan Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Pengukuran ini dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkualitas adalah: Manusia yang dapat hidup sehat dan

panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup sejak waktu lahir (*life expectancy at birth*); Manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa (*adult literacy rate*) dengan bobot penilaian dua pertiga, serta indikator kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan; Manusia yang dapat mencapai standar hidup layak, sebagaimana diukur dengan logaritma pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang menggunakan indikator *Purchasing Power Parity* (PPP) yang dihitung dalam dolar Amerika.

2.1.2.1 Metode Baru Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) “terdapat 3 komponen dalam menghitung indeks pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi pengeluaran.” IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

Dimensi Kesehatan:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\text{min}}}{\text{AHH}_{\text{maks}} - \text{AHH}_{\text{min}}}$$

Dimensi Pendidikan:

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

$$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}}$$

Diatas merupakan cara menghitung IPM. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah uang yang dihabiskan pemerintah untuk barang dan jasa atau item lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang diatur dalam APBN dan APBD. Pengeluaran pemerintah dapat dilakukan oleh pemerintah lokal, regional, dan nasional, dan mencakup berbagai bidang seperti pertahanan, pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, investasi, dan pembayaran transfer. Pengeluaran pemerintah juga merupakan salah satu variabel pembentuk PDB.

2.1.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Rostow dan Musgrave Colm & Musgrave

Model pembangunan oleh Rostow dan Musgrave Colm & Musgrave (1960) mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan atas tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase GNP akan bertambah besar, sedangkan persentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Lalu Colm & Musgrave (1960) menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi, peran pemerintah akan beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk program-program sosial dalam rangka pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Teori Wagner

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurut teori ini apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara.

2.1.3.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – provinsi – daerah). Pendidikan memegang peranan penting dalam memperkuat sumber daya manusia. Pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini tidak hanya karena pendidikan akan mempengaruhi produktivitas tetapi juga mempengaruhi kesuburan (angka kelahiran) suatu masyarakat. Pendidikan membantu sumber daya manusia lebih cepat memahami dan siap menghadapi perubahan dalam hidup. Oleh karena itu, secara umum mengajar

dianggap sebagai investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap dan produktivitas.

2.1.3.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu masyarakat. Melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat di Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa program yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan adalah program kesehatan gratis, asuransi kesehatan, dan penggunaan kartu miskin. Todaro & Smith, (2003) “bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat”. Anggaran dalam kesehatan yang digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan untuk masyarakat yaitu peningkatan layanan jaminan kesehatan negara seperti badan penyelenggara jaminan sosial-kesehatan, pembangunan rumah sakit dan pendorong hidup sehat, dalam mengakses kesehatan seperti jaminan kesehatan negara akan terpenuhi subsidi pemerintah yang mampu membuat individunya hidup sehat dan umur panjang yang mana merupakan komponen penyusun ipm.

2.1.4 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja ialah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Jadi kesempatan kerja merupakan jumlah

lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja atau dapat juga dikatakan ketersediaan lapangan kerja untuk yang memerlukan pekerjaan. Secara umum kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan seberapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap serta ikut aktif dalam perekonomian. Kesempatan kerja juga dapat dikatakan sebagai jumlah penduduk yang sedang bekerja ataupun yang mendapatkan pekerjaan, jika semakin banyak orang yang bekerja maka kesempatan kerjanya cukup luas atau banyak.

Kesempatan kerja itu timbul karena adanya investasi dan usaha untuk memperluas kesempatan kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan investasi, laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Strategi pembangunan yang diterapkan juga akan mempengaruhi usaha perluasan kesempatan kerja. Kesempatan kerja dalam menyerap tenaga kerja merupakan suatu masalah utama dalam pembangunan Indonesia, baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Ledakan penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara lapangan kerja untuk menampung mereka tidak memadai. Terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran.

2.1.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan

jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja antara lain:

1. Adanya kesempatan kerja yang tersedia (*demand for labor*): Permintaan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kebijakan pemerintah.
2. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan: Semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki, semakin besar kesempatan kerja yang tersedia.
3. Usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia: Semakin banyak angkatan kerja yang tersedia, semakin besar kesempatan kerja yang tersedia.
4. Besarnya permintaan total masyarakat: Semakin besar permintaan total masyarakat, semakin besar kesempatan kerja yang tersedia.
5. Jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta: Semakin banyak investasi yang dilakukan, semakin besar kesempatan kerja yang tersedia.
6. Kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan: Kebijakan pajak yang tepat dapat mendorong investasi dan pembangunan ketenagakerjaan.
7. Ekspor dan impor: Ekspor dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja, sementara impor dapat mengurangi permintaan tenaga kerja.

2.1.4.2 Teori Kesempatan Kerja

Menurut Keynes, tingkat pendapatan mungkin tidak cukup tinggi untuk menciptakan kesempatan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang ada. Untuk melihat

mengapa tingkat pendapatan ini mungkin tidak cukup tinggi untuk menciptakan kesempatan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang ada, maka anggaplah bahwa harga-harga uang dan upah-upah dalam uang bersifat fleksibel sehingga pengangguran turun. Pengaruh dari penurunan-penurunan ini atas kedua komponen pendapatan nasional adalah konsumsi dan investasi. Penurunan harga yang berimbang dengan penurunan tingkat upah tidaklah akan merubah pengeluaran-pengeluaran konsumsi nyata sedangkan kesempatan kerja tergantung pada pengeluaran-pengeluaran untuk konsumsi nyata dan investasi serta tidak akan ada pengaruh penciptaan lapangan kerja dari penurunan harga serta upah.

Lebih jauh di jelaskan bahwa elastisitas pemerintah akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan dari bahan-bahan pelengkap dalam produksi, misalnya modal, tenaga listrik, bahan mentah dan lain-lain. Modal yang di investasikan dalam suatu usaha berupa uang atau barang, misalnya mesin-mesin. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja dan sumber-sumber serta bahan-bahan di kelola oleh manusia. Semakin banyak kapasitas dan jumlah mesin-mesin yang di operasikan, semakin banyak tenaga kerja yang di perlukan. Jadi semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap (misalnya investasi), maka akan semakin besar elastisitas akan permintaan tenaga kerja. Adanya usaha pembangunan ekonomi nasional, biasanya beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang pesat dan sebagian yang lain mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga kemampuan setiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja.

Perbedaan laju pertumbuhan tersebut menyebabkan perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja masing-masing sektor dan secara berangsur-

angsur terjadi perubahan sektoral baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Negara-negara yang berpendudukan sangat padat dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sering mengalami masalah dalam hal penyerapan tenaga kerja. Indonesia sebagai salah satu Negara berpendudukan padat juga tidak lepas dari permasalahan ini. Informasi yang sedikit mengenai kelebihan tenaga kerja di Indonesia tidak tersedia, akan tetapi secara umum di setuju bahwa proporsi tenaga kerja yang menganggur adalah sangat tinggi. Selain kenyataan bahwa banyak sekali tenaga yang tidak dimanfaatkan seluruhnya di Indonesia, juga di ketahui laju pertumbuhan tenaga kerja terus meningkat.

Landasan membuat suatu kerangka dasar bagi pertumbuhan strategi penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menahan kenaikan lebih lanjut dari kelebihan tenaga kerja di Indonesia digunakan kerangka dasar perkiraan menggunakan konsep elastisitas kesempatan kerja. Dalam hubungannya dengan penciptaan lapangan kerja ini maka variable yang diukur untuk mencari elastisitas kesempatan kerja adalah dengan membagi perubahan kesempatan kerja dengan perubahan jumlah produksi. Dengan demikian semakin besar elastisitas kesempatan kerja maka penciptaan lapangan kerja juga semakin kecil. Semakin sempitnya daya serap sektor modern terhadap peluasan kesempatan kerja telah menyebabkan sektor tradisional merupakan tempat penampungan angkatan kerja.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan

penulis sebagai landasan berpikir, untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, PDRB dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Modal Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (Reza Prastia, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pendidikan • Pengeluaran Kesehatan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Kepadatan Penduduk 	Parsial: Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan pengaruh negatif, kesehatan pengaruh positif dan PDRB pengaruh positif.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia
2.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. (Ngakan Made Agung Aditia dan Ni Putu Martini Dewi, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pendidikan • Pengeluaran Kesehatan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Ekonomi 	Parsial: Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.	E-Jurnal EP Unud, 7[2]: 212-242 ISSN: 2303-0178
3.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. (Sanniana Sibadutar, Elidawaty Purba, Pawan Darasa Panjaitan, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pendidikan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Kemiskinan 	Parsial: Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan,	EKUILNO MI : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 2 Nov 2020 e – ISSN : 2614 – 7181
4.	Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Terhadap IPM di Provinsi Papua Tahun 2017-2022. (Suhendi dan Ismadiyah Purwaning Astuti, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pendidikan • Pengeluaran Kesehatan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Tingkat Kemiskinan 	Parsial: pengeluaran pemerintah Bidang pendidikan, kesehatan berpengaruh positif dan signifikan.	JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 7 No. 2, 20
5.	Analisis Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan 	Parsial: pengeluaran	Jurnal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara 2015-2018. (Magdalena Laode, Daisy S.M Engka, Jacline I Sumual, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi • Kemiskinan 	pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan,.	Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 02 Tahun 2020
6.	Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2019. (Ariska Ranadhani, Anderson G Kumenaung dan Krest D Tolosang, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pendidikan • Pengeluaran Kesehatan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pengangguran • Tingkat Kemiskinan • Pertumbuhan Ekonomi 	Parsial: pengeluaran di bidang pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan, pengeluaran di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No. 02 September 2021
7.	Pengaruh Teknologi, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jabar. (Abie Rachman Muhamad, Dewi Rahmi, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi • Kemiskinan • Pertumbuhan Ekonomi 	Parsial: pengeluaran pemerintah berpengaruh dan signifikan.	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIB) e-ISSN 2798-630X p-ISSN 2808-3024 Volume 3 No. 1 Juli 2023
8.	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. (Karina Gama Soleha dan Ayief Fathurrahman, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Bidang Pendidikan • Pengeluaran Bidang Kesehatan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Modal Asing (PMA) • Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 	Parsial: Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan positif, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ipm	Journal of Economics Research and Social Sciences e-ISSN 2723-5327 p-ISSN 2723-5319 Vol 1 No 1
9.	Analisis Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi 	Parsial: pengeluaran	Jurnal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM di Indonesia. (Dewi Azizah Meydiasari, Prof. Dr. H Ady Soejoto, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pendidikan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan • Tingkat Penangguran 	pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan.	Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan Vo 1. 01 No. 02 November 2017 Hal. 116 - 126
10.	Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. (Siska Damayanti, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan • Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Rata-rata Penduduk • Rasio Ketergantungan Daerah 	Parsial: pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan, berpengaruh, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap ipm.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia
11.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2018. (Sheila Sabrina, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan • Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk Miskin 	Parsial: Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, berpengaruh positif dan Signifikan, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif tidak signifikan.	E-Journal Undip
12.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan GDP Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2000 - 2020 Pendekatan Error Correction Model. (Abdul Hafid Al Ghazi, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan • Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • GDP 	Parsial: Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, kemudian pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
13.	Pengaruh PMA, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah, Tingkat Kemiskinan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018. (Intan Choirunnisa, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • IPM • Belanja Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • PMA • Pertumbuhan Ekonomi • Tingkat Kemiskinan • Indeks Pendidikan 	Parsial: belanja pemerintah pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, terhadap ipm.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
14.	Pengaruh Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan 	Parsial: kesempatan	JURNAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi dan Kesempatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Palangka Raya 2017-2022. (Suherman, Ahmad Fauzi Nurhidayat, Feby Adila Indria Sutrisno, Depy Rizkika Indria Sutrisno, Devi Astuti, Egi Ispreidi Maha	Kerja • IPM	Ekonomi	kerja berpengaruh positif dan signifikan.	ILMU EKONOMI (JIE) E-ISSN : 2985-4652
15	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banjar. (Nabeliah Farrasy Jannaty)	• IPM • Kesempatan Kerja	• Pertumbuhan Ekonomi	Parsial: kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap ipm	JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 1 No. 2, 2018, hal 230-240

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian dimunculkan kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Teori modal manusia W.Schultz, (1961). Teori ini menyebutkan bahwa pendapatan seseorang di tentukan oleh investasi di bidang pendidikan, migrasi tenaga kerja, akses informasi dan kesempatan kerja. Sehingga secara tidak langsung keahlian seseorang di pengaruhi oleh tingkat pendidikan sehingga akan meningkatkan pendapatan mereka yang secara nyata dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang ada, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memberikan kontribusi terhadap indeks pembangunan manusia yaitu modal manusia. Modal manusia merupakan hasil dari investasi yang dikeluarkan

pemerintah untuk pendidikan dimana jika modal pendidikan yang baik akan meningkatkan pembangunan manusia, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia. Menurut Wahid (2012) Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Pengeluaran pembangunan dalam sektor pendidikan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastuktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngakan Made Agung Aditia dan Ni Putu Martini Dewi (2018), Suhendi dan Ismadiyanti Purwaning Astuti (2023) dan Sannia Sibadutar, Elidawaty Purba, Pawan Darasa Panjaitan (2020).

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Hubungan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif karena aspek kesehatan merupakan sumber daya manusia yang mempengaruhi kualitas manusia, maka dari itu apabila suatu negara yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi dan fasilitas kesehatan yang baik akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat tersebut. Maka diperlukan pengalokasian anggaran khusus untuk meningkatkan kualitas manusia dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merupakan upaya untuk

memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. “Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji”.

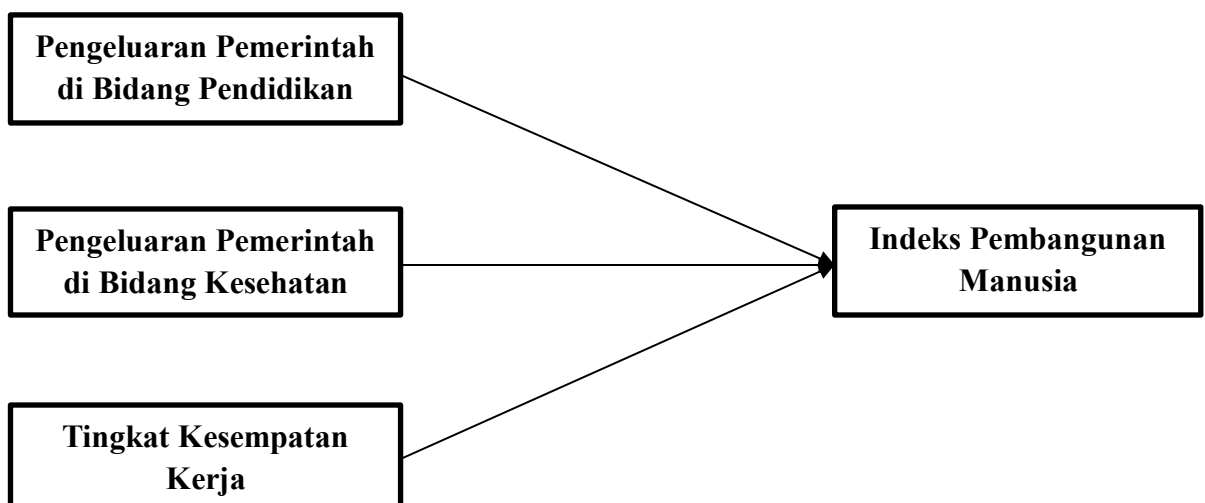
Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reza Prastia (2019), Karina Gama Soleha dan Ayief Fathurrahman (2017) dan Siska Damayanti (2018).

2.2.3 Hubungan Tingkat Kesempatan Kerja Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Hubungan antara kesempatan kerja dan kualitas sumber daya manusia atau indeks pembangunan manusia berpengaruh positif karena sumber daya manusia yang berkualitas akan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik, sedangkan kesempatan kerja yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas hidup manusia, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya seperti memberikan pelatihan kerja, meningkatkan investasi, memperbaiki infrastruktur, dan lain-lain. Namun, upaya tersebut harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suherman, Ahmad Fauzi Nurhidayat, Feby Adila Indria Sutrisno, Depy Rizkika Indria Dutrisno, Devi Astuti dan Egi Ispreidi Maha (2023) dan yang diteliti oleh Nabelah Farrasy Jannaty (2018).

Berdasarkan teori-teori yang mendukung penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan tingkat kesempatan kerja berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Maka dari itu, disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu, diduga:

1. Secara parsial pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan tingkat kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2005-2023.

2. Secara bersama-sama pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan tingkat kesempatan kerja berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2005-2023.